

**PARTISIPASI PETANI DALAM PROGRAM PERHUTANAN  
SOSIAL DI KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN  
BOYOLALI****Alwin Fatarin Lukito<sup>1</sup>, Dwiningtyas Padmaningrum<sup>2</sup>, Suminah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>)Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian,  
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia  
Email Korespondensi: [alwinfatarinsragen@gmail.com](mailto:alwinfatarinsragen@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to assess farmers participation in the social forestry program in Kemusu District, Boyolali Regency; assess factors influencing farmers participation in the social forestry program in Kemusu District, Boyolali Regency; and assess the influence of factors influencing farmers participation in the social forestry program in Kemusu District, Boyolali Regency. The basic research method used is quantitative with survey techniques. The population in this study were farmers in Kemusu District, Boyolali Regency who participated in the social forestry program. The sample used proportional random sampling with a total of 60 respondent farmers. Data analysis using multiple linear regression. The results showed that farmers' participation in the social forestry program in Kemusu District, Boyolali Regency was classified as low. Participation factors simultaneously have no significant effect in the social forestry program in Kemusu District, Boyolali Regency. Participation factors that partially significantly influence farmers' participation in the social forestry program are income and the role of others who are considered important. Non-formal education, personal experience, group dynamics and the role of government were not significantly influential.*

**Keywords:** kemusu, participation, social forestry

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi petani dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali; mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali; dan mengkaji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi terhadap petani dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Metode dasar penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik survei. Populasi dalam penelitian ini adalah petani di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali yang mengikuti program perhutanan sosial. Sampel dengan menggunakan *propotional random sampling* dengan jumlah petani responden sebanyak 60 orang. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

partisipasi petani dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali tergolong dalam kategori rendah. Faktor-faktor partisipasi secara serentak tidak berpengaruh signifikan dalam dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Faktor-faktor partisipasi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi petani dalam program perhutanan sosial yaitu pendapatan dan peran orang lain yang dianggap penting. Sedangkan yang tidak berpengaruh secara signifikan yaitu pendidikan non formal, pengalaman pribadi, dinamika kelompok dan peran pemerintah.

**Kata Kunci:** kemusu, partisipasi, perhutanan social

## PENDAHULUAN

Hutan merupakan bagian penting dari negara Indonesia. Beberapa fungsi hutan menurut Salim (2003) antara lain: (1) hutan merupakan habitat atau tempat hidup jenis flora dan fauna; (2) hutan sebagai resor (penimbunan) zat karbon dan kadar CO<sub>2</sub> dalam udara; (3) hutan berfungsi hidroorologi, yaitu pengaturan air dan perlindungan tanah terhadap erosi; (4) hutan sebagai ujung tombak pemulihan ekonomi bagi pemerintah dan sebagai modal pembangunan yang mudah untuk dimanfaatkan; (5) hutan sebagai tempat penyaluran fungsi sosial dan budaya masyarakat, terutama masyarakat pedesaan hutan yang kehidupannya sangat bergantung dengan hutan dan hasil hutan.

Salah satu sektor yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional adalah kehutanan. Kehutanan merupakan elemen kekayaan alam yang dapat diperbaharui (*renewable*), maka hutan dapat dijadikan modal bagi pertumbuhan ekonomi dan penopang sistem kehidupan (Kurniawati, 2010). Salah satu strategi yang dikembangkan sebagai implementasi dari paradigma pembangunan kehutanan adalah pengembangan program hutan rakyat dengan bentuk agroforestry, hutan tanaman campuran dan hutan tanaman murni. Hutan rakyat merupakan hutan yang tumbuh dan dibangun serta dikelola oleh rakyat, pada umumnya berada di atas tanah milik atau tanah adat. Kegiatan hutan rakyat merupakan salah satu bentuk dari *social forestry* (perhutanan sosial atau kehutanan masyarakat (*community forestry*)) (Nurrochmat, 2005).

Perhutanan sosial menurut Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Tujuan dan maksud perhutanan sosial menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 sebagai berikut : (1) Menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan; (2) Memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat di bidang perhutanan sosial. Wilayah persebaran Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) berada di seluruh provinsi Indonesia (KLHK, 2019). Salah satu

wilayah penerima program perhutanan sosial di Jawa Tengah adalah Kabupaten Boyolali.

Kabupaten Boyolali menerima Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sejumlah 728 ha untuk 627 KK sejak 4 November 2017 (KLHK, 2017). Perhutanan sosial di Kabupaten Boyolali khususnya di Kecamatan Kemusu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan sebagai lahan pertanian yang bersifat ekonomis (Agustian, 2017). Kecamatan Kemusu menerima Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) seluas 433 ha dengan pembagian kelompok tani Wonolestari I seluas 33 ha untuk 59 KK dan Wonolestari II seluas 400 ha untuk 345 KK.

Pemberian Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada petani bertujuan untuk dimanfaatkan dengan berbagai konsep pengelolaan, seperti diolah dengan sistem agroforestry, yaitu kombinasi pola tanam antara tanaman pertanian semusim dengan tanaman pertanian tahunan/tanaman kayu keras, atau dapat juga dengan konsep pengembangan ekowisata, yang memanfaatkan nilai jasa lingkungan berupa keindahan alam hutan. Target nasional perhutanan sosial adalah alokasi 12,7 juta ha lahan hutan untuk masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan izin lahan dan pencapaian target perhutanan sosial dapat terlaksana secara optimal dengan diperlukan partisipasi masyarakat

Menurut Conyers (1991) partisipasi memberikan manfaat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat serta meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Sehingga penting dikaji mengenai partisipasi petani di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dalam program perhutanan sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji partisipasi petani, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dan mengkaji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dasar kuantitatif dengan teknik survei. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan cara sengaja (*purposive*). Lokasi penelitian yang diambil adalah Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali yang merupakan salah satu lokasi penerima program Perhutanan Sosial dan penerima Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) seluas 433 ha dengan pembagian kelompok tani Wonolestari I seluas 33 ha untuk 59 KK dan Wonolestari II seluas 400 ha untuk 345 KK. Jumlah sampel petani responden pada penelitian ini adalah sebanyak 60 responden yang diambil secara *proporsional random sampling*. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan data kualitatif serta sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yang diambil dengan cara wawancara,

observasi, dokumentasi dan pencatatan. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji kuisioner. Uji validitas menggunakan korelasi pearson dilakukan terhadap 20 responden dengan  $r$  tabel 0,4438 dibandingkan dengan nilai  $r$  hitung, tidak terdapat pertanyaan yang invalid. Uji reliabilitas diperoleh nilai *cronbach's alpha* 0,701 berarti lebih besar dari 0,60, sehingga kuisioner bisa dikatakan reliabel. Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda, dilengkapi beberapa uji seperti uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas), dan pengujian hipotesis (Uji F, uji t, dan  $R^2$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

#### 1. Umur Petani

Tabel 1 Distribusi Umur Petani

No	Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	37-44 tahun	16	26,67
<b>2</b>	<b>45-52 tahun</b>	<b>22</b>	<b>36,66</b>
3	53-60 tahun	16	26,67
4	61-68 tahun	6	10,00
Jumlah		60	100,00

Sumber: Analisis Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 1 distribusi umur petani dapat diketahui bahwa umur petani dilokasi penelitian mayoritas berumur 45-52 tahun berjumlah 22 orang atau 34.66 %. Penelitian yang dilakukan pada 60 responden diperoleh data bahwa petani responden berusia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah 58 orang. Petani responden yang berusia non produktif (>64 tahun) berjumlah 2 orang.

#### 2. Pendidikan Formal Petani

Tabel 2 Distribusi Pendidikan Formal Petani

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	3	5,00
<b>2</b>	<b>SD</b>	<b>48</b>	<b>80,00</b>
3	SMP	7	11,67
4	SMA	2	3,33
5	Sarjana	0	0
Jumlah		60	100,00

Sumber: Analisis Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 2 distribusi pendidikan petani dapat diketahui bahwa pendidikan petani dilokasi penelitian yaitu mayoritas petani memiliki pendidikan formal pada jenjang SD dengan jumlah 48 orang atau 80 %. Tingkat pendidikan petani baik formal maupun non formal akan

mempengaruhi cara berpikir yang diterapkan pada usahatani (Soekarwati, 2005).

## B. Partisipasi Petani dalam Program Perhutanan Sosial

Tabel 3 Distribusi Petani Berdasarkan Partisipasi terhadap Program Perhutanan Sosial

Tahapan	Kategori	Skor	Distribusi	
			Orang	%
<b>Perencanaan</b>	Sangat Tinggi	22,03 – 25,45	12	20,00
	Tinggi	18,60 – 22,02	0	0,000
	Rendah	15,17 – 18,59	11	18,34
	<b>Sangat Rendah</b>	<b>11,74 – 15,16</b>	<b>37</b>	<b>61,66</b>
<b>Jumlah</b>			<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Pelaksanaan</b>	Sangat Tinggi	16,51 – 19,67	7	11,67
	Tinggi	13,34 – 16,50	12	20,00
	<b>Rendah</b>	<b>10,17 – 13,33</b>	<b>23</b>	<b>38,33</b>
	Sangat Rendah	7,00 – 10,16	18	30
<b>Jumlah</b>			<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Pemanfaatan Hasil</b>	Sangat Tinggi	14,95 – 17,10	6	10,00
	Tinggi	18,60 – 22,02	5	8,34
	<b>Rendah</b>	<b>15,17 – 18,59</b>	<b>27</b>	<b>45,00</b>
	Sangat Rendah	8,47 -10,62	22	36,66
<b>Jumlah</b>			<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Evaluasi</b>	Sangat Tinggi	22,45 – 26,59	3	5,00
	Tinggi	18,30 – 22,44	13	21,67
	<b>Rendah</b>	<b>14,15 – 18,28</b>	<b>23</b>	<b>38,33</b>
	Sangat Rendah	10,00 – 14,14	21	35,00
<b>Jumlah</b>			<b>60</b>	<b>100</b>
<b>Partisipasi Total</b>	Sangat Tinggi	72,87 – 83,75	4	6,67
	Tinggi	61,98 – 72,86	14	23,33
	<b>Rendah</b>	<b>51,09 – 61,97</b>	<b>28</b>	<b>46,67</b>
	Sangat Rendah	40,20 – 51,08	14	23,33
<b>Jumlah</b>			<b>60</b>	<b>100</b>

Sumber: Analisis Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 5.3 partisipasi petani total dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Kemusu dalam kategori rendah sebesar 46,67% yang didapatkan dari partisipasi petani pada tahap perencanaan sangat rendah, tahap pelaksanaan rendah, tahap pemanfaatan hasil rendah dan tahap evaluasi rendah.

Partisipasi pada tahap perencanaan dalam program perhutanan sosial tergolong dalam kategori sangat rendah sebesar 61,66 %. Partisipasi petani pada perencanaan adalah peran serta langsung petani dalam proses perencanaan dalam menerapkan program perhutanan sosial yang terdiri dari intensitas mendapatkan undangan rapat, menghadiri rapat kegiatan, keaktifan

petani dalam menyampaikan ide atau gagasan, dan penyusunan rencana-rencana yang akan dijalankan dalam program perhutanan sosial.

Hasil dilapang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani dalam tahap perencanaan termasuk dalam golongan sangat rendah. Hampir keseluruhan petani mendapatkan undangan rapat kegiatan program perhutanan sosial, namun hanya sebagian petani yang aktif menghadiri rapat kegiatan tersebut dikarenakan jarak tempat tinggal dengan lokasi kegiatan relatif jauh serta jadwal waktu yang berseberangan dengan kegiatan yang lainnya. Kurang minatnya petani dalam menghadiri rapat kegiatan dari awal hingga selesai karena nantinya hasil dari rapat tersebut akan disebarluaskan oleh pengurus kelompok sehingga petani merasa tidak perlu untuk menghadiri pertemuan. Kurang aktifnya petani dalam menyampaikan ide atau gagasan hal ini dikarenakan petani tidak atau kurang dapat mengungkapkan ide atau gagasan dan hanya mengikuti orang yang mereka anggap lebih tahu atau berpengalaman.

Partisipasi petani pada tahap pelaksanaan program perhutanan sosial tergolong dalam kategori rendah sebesar 38,33%. Partisipasi petani pada tahap pelaksanaan adalah keikutsertaan petani secara langsung dalam melaksanakan program perhutanan sosial yang terdiri dari keikutsertaan pengajuan permohonan izin pelaksanaan program perhutanan sosial dari awal hingga turunnya Surat Keputusan (SK), keikutsertaan dalam menyiapkan berkas administrasi, mengikuti pelatihan, sosialisasi, pertemuan rutin kelompok tani dan pengelolaan lahan garapan perhutanan sosial dengan system agroforestry (wanatani). Hasil dilapang menunjukkan bahwa petani masih belum maksimal dalam pelaksanaan program perhutanan sosial dikarenakan sebagian besar petani dalam pengelolaan lahan garapan tidak menggunakan sistem agroforestry, petani masih mencari aman dengan menanam satu jenis tanaman dikarenakan petani beranggapan bahwa semakin banyak jenis tanaman yang ditanam akan semakin banyak modal dan resiko yang ditanggung.

Partisipasi petani pada tahap pemanfaatan hasil dalam program perhutanan sosial tergolong dalam kategori rendah sebesar 45%. Partisipasi petani pada tahap pemanfaatan hasil adalah sejauh mana petani merasakan manfaat atau hasil dari adanya program perhutanan sosial yang dilihat dari peningkatan hasil produksi tanaman tahunan maupun musiman, peningkatan pendapatan, peningkatan ketrampilan dan pengalaman, hubungan keharmonisan keluarga dan antar anggota kelompok serta dihormati haknya petani sebagai warga karena dapat memanfaatkan kawasan hutan. Hasil dilapang menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil dalam program perhutanan sosial masih rendah dikarenakan masih banyak petani kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan yang sedikit sehingga petani masih banyak yang mengajukan simpan pinjam dikoperasi maupun dibank atau meminjam uang kepada sanak saudara.

Partisipasi petani pada tahap evaluasi dalam program perhutanan sosial tergolong dalam kategori rendah sebesar 38,33%. Partisipasi petani pada tahap evaluasi adalah keterlibatan petani dalam bentuk penilaian atau

tanggapan dalam program perhutanan sosial, keikutsertaan petani dalam memberikan kritik atau saran mengenai program perhutanan sosial. Frekuensi penyuluh mengadakan evaluasi dengan petani terkait perhutanan sosial sangat sering dilakukan, selain itu Kabag Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM Sekretariat Daerah Prov. Jateng, perwakilan dari BAPPEDA, perwakilan CDK III, dan perwakilan DLHK Provinsi Jawa Tengah juga mengadakan evaluasi dengan petani dalam program perhutanan sosial, dengan terjun langsung dilapang. Namun, hasil dilokasi penelitian menunjukkan bahwa petani yang aktif dalam menyampaikan kritik, saran, solusi dan hadir dalam evaluasi adalah petani yang menjadi pengurus kelompok tani saja sedangkan anggota kelompok tani yang lainnya mengikuti petani yang lebih paham dan berpengalaman (idem).

### C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani dalam Program Perhutanan Sosial

#### 1. Pendidikan Non Formal

Tabel 4 Distribusi Petani Berdasarkan Pendidikan Non Formal

No	Kategori	Skor	Distribusi	
			Orang	%
1	Sangat Tinggi	3,19 – 3,48	31	51,67
2	Tinggi	2,89 – 3,18	0	00,00
3	Rendah	2,59 – 2,88	0	00,00
4	Sangat Rendah	2,29 – 2,58	29	48,33
<b>Jumlah</b>			60	100

Sumber: Analisis Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4 pendidikan non formal petani dalam kategori sangat tinggi sebesar 51,67% dari total responden. Hasil dilapang menunjukkan minat petani dalam mengikuti penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi sangat tinggi dikarenakan seringnya petani mengikuti kegiatan tersebut. Rasa keingintahuan dan paham adanya ilmu yang bermanfaat yang dapat diambil untuk diterapkan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial oleh petani. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sering mengadakan pelatihan dengan materi seperti pelatihan tanaman tegalan (empon-empon), penangkaran burung dan pembuatan pupuk bokhasi. Cabang Dinas Kehutanan (CDK) III juga sering mengadakan pelatihan seperti budidaya lebah dan budidaya minyak kayu putih. Tujuan diadakannya pelatihan tersebut diharapkan petani dapat mengetahui ilmunya dan menerapkan dalam usahatani masing-masing sehingga dapat menghasilkan tambahan pendapatan.

## 2. Pengalaman Pribadi

Tabel 5 Distribusi Petani Berdasarkan Pengalaman Pribadi

No	Kategori	Skor	Distribusi	
			Orang	%
1	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>5,33 – 6,43</b>	<b>52</b>	<b>86,67</b>
2	Tinggi	4,22 – 5,32	0	00,00
3	Rendah	3,11 – 4,21	7	11,67
4	Sangat Rendah	2,00 – 3,10	1	1,66
<b>Jumlah</b>			<b>60</b>	<b>100</b>

Sumber : Analisis Data Primer 2022

Pengalaman pribadi petani tergolong sangat tinggi dikarenakan banyak petani yang berumur tua tetapi masih dalam kategori usia produktif sehingga banyak memiliki pengalaman dalam berusahatani. Adanya program perhutanan sosial ini menarik perhatian petani. Dikarenakan program perhutanan sosial ini memberikan Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada petani bertujuan untuk dimanfaatkan dengan berbagai konsep pengelolaan, seperti diolah dengan sistem agroforestry.

Ketrampilan yang diperoleh petani dari program perhutanan diantaranya mengetahui budidaya empon-empon, pembuatan pupuk bokhasi, penyulingan minyak kayu putih, budidaya lebah dan penangkaran burung. Selain ketrampilan petani juga mendapatkan keuntungan diantaranya meningkatnya hasil pendapatan, penjualan hasil minyak kayu putih lebih tinggi dikarenakan melakukan penyulingan sendiri, pajak yang rendah, mendapatkan pendampingan dari CDK III dan DLHK Prov. Jawa Tengah dan petani termotivasi untuk lebih bersemangat dalam usahatani. Pengalaman negatif juga pernah dirasakan oleh petani dalam melaksanakan program perhutanan sosial diantaranya susahny mengubah pola pikir petani dan permodalan dalam berusahatani.

## 3. Pendapatan

Tabel 6 Distribusi Petani Berdasarkan Pendapatan

No	Kategori	Skor	Distribusi	
			Orang	%
1	Sangat Tinggi (>42.000.000)	3.19 – 3.48	19	31,67
2	Tinggi (36.000.000 – 42.000.000)	2.89 – 3.18	0	00,00
3	Rendah (24.000.000 – 30.000.000)	2.59 – 2.88	0	00,00
4	<b>Sangat Rendah (12.000.000 – 18.000.000)</b>	<b>2,29 – 2,58</b>	<b>41</b>	<b>68,33</b>
<b>Jumlah</b>			<b>60</b>	<b>100</b>

Sumber : Analisis Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 6 pendapatan petani dalam satu tahun mayoritas dalam kategori sangat rendah (12.000.000 – 18.000.000) sebesar 68,33%. Pemberian SK izin pemanfaatan lahan kepada petani rata-rata seluas 5000m<sup>2</sup>per orang. Luasnya lahan yang diberikan izin kepada petani menyebabkan petani harus mengeluarkan modal besar untuk usahatani. Selain itu, petani juga harus mengeluarkan biaya pajak setiap hasil tanam saat panen. Pajak 15% untuk kayu putih dan 10% untuk jagung. Hal ini mengurangi pendapatan petani dalam program perhutanan sosial.

Pendapatan petani selain dari pertanian juga dari non pertanian seperti buruh bangunan, buruh pabrik, pedagang dan berwirausaha. Pendapatan pertanian dari non pertanian dapat menutupi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sejalan dengan penelitian Torgler (2010) situasi ekonomi individu atau pendapatan berpengaruh dan berkaitan erat dengan partisipasi, karena modal sosial tidak hanya waktu tetapi juga pengeluaran moneter.

#### 4. Dinamika Kelompok

Tabel 7 Distribusi Petani Berdasarkan Dinamika Kelompok

No	Kategori	Skor	Distribusi	
			Orang	%
1	Sangat Tinggi	109.96 – 126.51	11	18,33
2	<b>Tinggi</b>	<b>93,40 – 109,95</b>	<b>25</b>	<b>41,67</b>
3	Rendah	76,84 – 93,39	21	35
4	Sangat Rendah	60,28 – 76,83	3	5
<b>Jumlah</b>			60	100

Sumber : Analisis Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 5.7 dinamika kelompok tergolong dalam kategori tinggi sebesar 41,67%. Hasil dilapang menunjukkan mayoritas petani mengetahui dan memahami tujuan kelompoknya yakni pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestry dengan tujuan meningkatnya pendapatan. Menurut Mardikanto (1993), kejelasan tujuan kelompok akan sangat berpengaruh terhadap perilaku atau tindakan-tindakan anggota kelompok.

Terdapat struktur kelompok yang jelas sudah ditetapkan bersama di masing-masing kelompok tani. Susunan pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, seksi- seksi dan keamanan. Menurut Mardikanto (1993), ketidakjelasan mengenai struktur kelompok, akan berpengaruh terhadap ketidakjelasan: kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kekuasaan masing-masing anggotanya, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mungkin dapat berlangsung secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kelompok.

Sebagian petani tidak semuanya mengetahui dan memahami tugas pengurus dikelompok. Tetapi terdapat distribusi tugas dalam struktur kelompok. Pembagian tugas didalam kelompok memudahkan mencapai tujuan kelompok, sehingga antar pengurus memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan. Menurut Mardikanto (1993), setiap orang harus

memahami betul tugas-tugas yang harus dilaksanakannya demi tercapainya tujuan kelompok.

Terdapatnya pembinaan dan pemeliharaan kelompok seperti, tersedianya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan program perhutanan sosial sebagian besar sudah cukup memadai antara lain tempat pertemuan, kantor kesekretariatan kelompok tani, peralatan alat tulis dan konsumsi saat berlangsungnya kegiatan. Menurut Mardikanto (1993) upaya kelompok untuk tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan kelompok dengan berusaha memelihara tata kerja dalam kelompok, mengatur, dan memperkuat kelompok.

Kekompakan kelompok yang tinggi karena di dalam kelompok terdapat kerjasama dan gotong royong saling membantu antar anggota kelompok. Kerjasama yang dilakukan seperti kegiatan pemanenan yang sering dilakukan bersama-sama. Menurut Mardikanto (1993) rasa keterikatan itu, dapat dilihat atau ditunjukkan menjadi anggota, persamaan nasib, homogenitas perilaku, kesepakatan terhadap tujuan kelompok, dan pengakuan terhadap kepemimpinan kelompok.

Suasana kelompok yang baik karena selalu ada komunikasi antar anggota kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian besar kelompok memiliki grup di media sosial seperti di *whatsapp*, dengan adanya grup tersebut semua informasi bisa didapatkan. Di dalam kelompok juga terdapat kesempatan anggota untuk mengeluarkan ide atau pendapatnya, sehingga masukan yang diberikan anggota bisa memperbaiki dan mencapai target yang ingin di capai oleh kelompok. Menurut Mardikanto (1993), lingkungan fisik dan nonfisik yang akan mempengaruhi perasaan setiap anggota kelompok terhadap kelompoknya.

Mayoritas anggota kelompok tidak mengalami tekanan yang terdapat dikelompok. Tidak terdapat tekanan dalam kelompok maupun di luar kelompok, sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan kelompok. Menurut Mardikanto (1993), tekanan atau ketegangan dalam kelompok yang menyebabkan kelompok tersebut berusaha keras mencapai tujuan kelompok. Sebagian tujuan kelompok ada yang belum tercapai diantaranya pengelolaan lahan belum maksimal dan penanaman tanaman belum menerapkan agroforestry.

## 5. Peran Orang Lain yang Dianggap Penting

Tabel 8 Distribusi Petani Berdasarkan Peran Orang Lain yang dianggap Penting

No	Kategori	Skor	Distribusi	
			Orang	%
1	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>9,418 – 11,223</b>	<b>18</b>	<b>30</b>
2	Tinggi	7.612 – 9,417	16	26,67
3	<b>Rendah</b>	<b>5,806 – 7,611</b>	<b>18</b>	<b>30</b>
4	Sangat Rendah	4,000 – 5,805	8	23,37
<b>Jumlah</b>			60	100

Sumber : Analisis Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 8 distribusi petani berdasarkan peran orang lain yang dianggap penting tergolong dalam kategori sangat tinggi dan rendah sejumlah 18 orang atau sebesar 30%. Hasil dilapang menunjukkan bahwa adanya keikutsertaan dan keterlibatan penyuluh dalam mendampingi setiap adanya kegiatan, pelatihan dan sosialisasi. Ketua kelompok tani juga ikut serta dan terlibat dalam pelaksanaan program perhutanan sosial seperti memberikan contoh terlebih dahulu kepada anggota petani lainnya dengan harapan mereka ikut termotivasi. Keterlibatan ketua LSM dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun ini jarang terlihat dikarenakan kondisi kesehatan. Petani lain yang dianggap lebih berpengalaman dan dianggap berpengaruh kepada petani lainnya juga aktif mengikuti pelatihan dan memberikan motivasi.

## 6. Peran Pemerintah

Tabel 9 Distribusi Petani Berdasarkan Peran Pemerintah

No	Kategori	Skor	Distribusi	
			Orang	%
1	Sangat Tinggi	6,84 – 8,11	16	26,67
2	Tinggi	5,56 – 6,83	6	10
3	<b>Rendah</b>	<b>4,28 – 5,55</b>	<b>27</b>	<b>45</b>
4	Sangat Rendah	3,00 - 4,27	11	18.33
<b>Jumlah</b>			<b>60</b>	<b>100</b>

Sumber: Analisis Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 9 disitribusi petani berdasarkan peran pemerintah dalam kategori rendah sebesar 45%. Hasil dilapang menunjukkan bahwa peran pemerintah yang sering terlibat antara lain dari Cabang Dinas Kehutanan III dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Pemberian pendampingan dan pengawasan selalu dilakukan akan tetapi karena adanya pandemi COVID 19, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PKKM). Pendampingan dan pengawasan menjadi terkendala, hanya melalui grup whatsapp saja. Setiap satu tahun sekali pemerintah juga melakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan perkembangan program perhutanan sosial.

Pemerintah memberikan fasilitas petani berupa pelatihan-pelatihan budidaya tanaman, pembuatan pupuk, penangkaran burung, penyulingan minyak kayu putih dan KBR (Kebun Bibit Rakyat) serta memberikan fasilitas bantuan alsintan. Alat pipil jagung, penepung, mesin pembuatan tortilla, dan penyulingan minyak. Akan tetapi bantuan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi lahan dan kebutuhan petani. Sehingga petani mengeluarkan modal untuk memodifikasi alsintan tersebut.

**D. Pengaruh Pendidikan Non Formal, Pengalaman Pribadi, Pendapatan, Dinamika Kelompok, Peran Orang Lain yang Dianggap Penting, Peran Pemerintah terhadap Partisipasi Petani dalam Program Perhutanan Sosial**

**1. Uji Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F)**

Tabel 10 Hasil Uji F terhadap Variabel Y

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	854,297	6	142,383	1,941	0,091 <sup>b</sup>
Residuel	3888,042	53	73,359		
Total	4742,339	59			

Sumber : Analisis Data Primer 2022

Hasil uji F pada tabel 10 menunjukkan bahwa p value sebesar 0,091. Diperoleh nilai  $p \text{ value} > \alpha$  atau  $0,091 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti variabel independen (pendidikan non formal, pengalaman pribadi, pengalaman pribadi, pendapatan, dinamika kelompok, peran orang lain yang dianggap penting dan peran pemerintah) tidak berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (partisipasi petani dalam program perhutanan sosial).

**2. Uji Parsial (Uji t)**

Tabel 11 Hasil Uji t terhadap Variabel Y

Model	<i>Unstandardized Coefficient</i>	<i>P value</i>	<i>Keterangan</i>
(Constant)		0,006	Signifikan
Pendidikan Nonformal		0,056	Tidak Signifikan
Pengalaman Pribadi		0,315	Tidak Signifikan
Pendapatan		0,040	Signifikan
Dinamika Kelompok		0,731	Tidak Signifikan
Peran Orang Lain yang Dianggap Penting		0,041	Signifikan
Peran Pemerintah		0,411	Tidak Signifikan

Sumber : Analisis Data Primer 2022

a) Pengaruh pendidikan non formal (X1) terhadap partisipasi petani  
 Nilai p value pada variabel pendidikan non formal (X1) sebesar 0,056 menunjukkan  $p \text{ value} > \alpha$  atau  $0,056 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti pendidikan non formal secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi petani dengan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Maka tinggi rendahnya pendidikan non formal tidak berpengaruh pada partisipasi petani dalam program perhutanan sosial.

- b) Pengaruh pengalaman pribadi (X2) terhadap partisipasi petani  
Nilai p value pada variabel pengalaman pribadi (X2) sebesar 0,315 menunjukkan p value  $> \alpha$  atau  $0,315 > 0,05$  maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti pengalaman pribadi secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi petani dengan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Maka tinggi rendahnya pengalaman pribadi tidak berpengaruh pada partisipasi petani dalam program perhutanan sosial.
- c) Pengaruh pendapatan (X3) terhadap partisipasi petani  
Nilai p value pada variabel pendapatan (X3) sebesar 0,040 menunjukkan p value  $< \alpha$  atau  $0,040 < 0,05$  maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti pendapatan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi petani dengan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Maka tinggi rendahnya pendapatan berpengaruh pada partisipasi petani dalam program perhutanan sosial.  
Sejalan dengan penelitian Sulistriyanti (2015) bahwa tinggi rendahnya pendapatan maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi. Sesuai dengan pernyataan Torgler (2010) bahwa situasi ekonomi individu atau pendapatan berpengaruh dan berkaitan erat dengan partisipasi, karena modal sosial tidak hanya waktu tetapi juga pengeluaran moneter.
- d) Pengaruh dinamika kelompok (X4) terhadap partisipasi petani  
Nilai p value pada variabel dinamika kelompok (X4) sebesar 0,731 menunjukkan p value  $> \alpha$  atau  $0,731 > 0,05$  maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti dinamika kelompok secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi petani dengan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Maka tinggi rendahnya dinamika kelompok tidak berpengaruh pada partisipasi petani dalam program perhutanan sosial.
- e) Pengaruh peran orang lain yang dianggap penting (X5) terhadap partisipasi petani  
Nilai p value pada variabel peran orang lain yang dianggap penting (X5) sebesar 0,041 menunjukkan p value  $< \alpha$  atau  $0,041 < 0,05$  maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti secara parsial peran orang lain yang dianggap penting memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi petani dengan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Maka tinggi rendahnya pengaruh orang lain yang dianggap penting berpengaruh pada partisipasi petani dalam program perhutanan sosial.
- f) Pengaruh peran pemerintah (X6) terhadap partisipasi petani  
Nilai p value pada variabel peran pemerintah (X6) sebesar 0,411 menunjukkan p value  $> \alpha$  atau  $0,411 > 0,05$  maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti peran pemerintah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi petani dengan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ).

Maka tinggi rendahnya peran pemerintah tidak berpengaruh pada partisipasi petani dalam program perhutanan sosial.

### 3. Uji Koefisien Determinansi ( $R^2$ )

Tabel 12 Hasil Uji Model Summary

Model	R Square	Adjusted R Square
1	0,180	0,087

Sumber : Analisis Data Primer 2022

Tabel 5.12 Menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  adalah 0,180. Hal ini berarti variabel independen (pendidikan non formal, pengalaman pribadi, pendapatan, dinamika kelompok, peran orang lain yang dianggap penting dan peran pemerintah) tidak dapat menjelaskan variabel dependen (partisipasi petani dalam program perhutanan sosial) sebesar 18% sedangkan sisanya 82% diterangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi petani dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan hasil, dan tahap evaluasi menunjukkan bahwa partisipasi petani pada kategori rendah. Pendidikan non formal, pengalaman pribadi, pendapatan, dinamika kelompok, peran orang lain yang dianggap penting dan peran pemerintah tidak dapat berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap partisipasi petani dalam program perhutanan sosial. Secara parsial pendapatan dan peran orang lain yang dianggap penting berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi petani dalam program perhutanan sosial. Pendidikan non formal, pengalaman pribadi, dinamika kelompok dan peran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi petani dalam program perhutanan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian Widi. 2017. *Program Perhutanan Sosial Petani Pemalang dan Boyolali Bakla Terima KUR*. Jakarta: Economy.okezone.com.
- Cohen J dan Uphoff N. 1980. *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*. New York: Cornell University.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017. *Rencana Strategi 2015-2019*. file:/// /Rencanastrategi2015-2019.html. diakses pada tanggal 11Desember 2019.

- \_\_\_\_\_2019 *Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial*. file:/// / petaindikatifdan arealperhutanansosial.html. diakses pada tanggal 11 Desember 2019.
- Kurniawati, N. 2010. Analisis Peranan Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Indonesia: Pendekatan Input Output. Tesis Magister Perancangan dan Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University.
- Nurrochmat, Dodik Ridho. 2005. *Strategi Pengelolaan Hutan: Upaya Menyelamatkan Rimba yang Tersisa*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Salim, Emil. 2003. Hutan dan Masyarakat Indonesia dalam Era Perubahan. Hal 481-491 dalam Carol J.P.C dan Ida AYU Pradnja Resosudarmo, *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Soekarwati. 2005. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Torgler B, Garcia Valinas M, Macintyre A. 2010. *Participation in Environmental Organization*. New York: Routledge.